

**PENCEGAHAN KONFLIK DI KABUPATEN ENDE NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2014-2019
(STUDI RAKOR TIGA BATU TUNGKU)**

**CONFLICT PREVENTION IN ENDE DISTRICT EAST NUSA TENGGARA 2014-2019
(STUDY OF THREE STONE FURNACE MEETING)**

Yosep Susanto¹, Bambang Wahyudi², Lukas Parmadi³

UNIVERSITAS PERTAHANAN
(santo.yose12@gmail.com)

Abstrak Studi ini menganalisa upaya pencegahan konflik adat yang terjadi di Kabupaten Ende, yang merupakan sarana bertemunya para pemimpin suku adat yang ada di wilayah Kabupaten Ende dengan demikian dapat dijadikan sebagai ruang untuk merajut dan menumbuhkan kekuatan bekerjasama dan sama-sama bekerja dalam konteks kemitraan sesuai peran dan fungsi masing-masing pemerintah, para mosalaki dan pimpinan agama dalam upaya pencegahan konflik di Kabupaten Ende. Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam menganalisis hasil penelitian diantaranya: Teori Eskalasi Glasl, Konstruksi Budaya Damai, Konsep Kearifan Lokal. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Sumber data primer diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara langsung dengan berbagai narasumber yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, dokumen maupun literatur yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Rakor Tiga Batu Tungku kekuatan budaya dan nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat Kabupaten Ende seperti seremoni adat sebagai model penyelesaian dan pencegahan konflik masyarakat adat di Kabupaten Ende. Lembaga adat dalam penanganan/penyelesaian konflik-konflik yang terjadi pada wilayah hukum adat setempat ternyata sangat penting dan strategis, baik pada tahap pencegahan maupun tahap penanganan, penyelesaian. Rekomendasi penelitian ini agar mengajarkan kembali bentuk seremoni adat pada generasi penerus sebagai pengetahuan adat yang turun temurun supaya tidak terjadi pelanggaran nilai-nilai adat, aksi lanjutan dalam penguatan lembaga adat yang ada sehingga dapat berfungsi efektif dalam pencegahan konflik yg terjadi.

Kata Kunci : Budaya Damai, Kearifan Lokal, Pencegahan Konflik, Rakor Tiga Batu Tungku, Seremoni Adat.

Abstract This study analyzes efforts to prevent adat conflicts occurring in Ende Regency, which are a means of meeting traditional tribal leaders in the Ende Regency area, so that they can be used as a space to knit and grow the strength of cooperation and work together in the context of partnership according to the role and the functions of each government, mosalaki and religious leaders in conflict prevention efforts in Ende Regency. The theories and concepts used in analyzing the results of the study include: The Escalation Theory of Glasl, Peaceful Cultural Construction, Local Wisdom Concepts. This study uses a qualitative approach with a case study method. Primary data sources were obtained through direct observations and interviews with various sources determined by purposive

¹ Program Studi Damai dan Resolusi Konflik. Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

² Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

³ Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

sampling technique. While secondary data is obtained from books, documents and literature that have relevance to the research topic. The results showed that in the Rakor Tiga Batu Tungku cultural strength and religious values that live in the Ende Regency community such as traditional ceremonies as a model for resolving and preventing conflicts of indigenous peoples in Ende Regency. Customary institutions in handling / resolving conflicts that occur in the area of local customary law turned out to be very important and strategic, both at the stage of prevention and handling, resolution. The recommendations of this study are to re-teach the traditional ceremonial forms to the next generation as traditional knowledge that has been passed down from generation to generation so that there are no violations of traditional values, further action in strengthening existing traditional institutions so that they can function effectively in preventing conflicts.

Keywords: Peace Culture, Local Wisdom, Conflict Prevention, Three Stone Furnace Meeting, Traditional Ceremony.

Pendahuluan

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia mempunyai karakteristik yang beragam. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi. Dari sini, ada benarnya jika sejarah umat manusia merupakan sejarah konflik. Konflik selalu terjadi di dunia, dalam sistem sosial yang bernama negara, bangsa, organisasi, perusahaan, bahkan dalam sistem sosial terkecil yang bernama keluarga dan pertemanan. Konflik terjadi dimasa lalu, sekarang dan pasti akan terjadi dimasa yang akan datang⁴.

Konflik sosial adalah perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Sumber-sumber konflik antara lain permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya, perseteruan antar umat beragama dan/atau inter umat

beragama, antar suku/etnis, sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan provinsi, sengketa sumber daya alam antar masyarakat atau antar masyarakat dengan pelaku usaha, distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat. Secara demografis, banyak jumlah penduduk dengan keragaman etnis, adat-istiadat, agama dan politik menyebabkan Indonesia kaya akan tradisi dan budaya. Tetapi disisi lain juga dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial yang dapat menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat/etnis dan tentunya akan mengganggu persatuan dan kesatuan serta memicu disintegrasi bangsa⁵.

Dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan dinamika kehidupan masyarakat sering terjadinya kondisi yang tidak dapat dielakkan seperti timbulnya benturan kepentingan antar kelompok masyarakat yang berbeda suku maupun agama. Konsepsi negara yang semula diharapkan mampu merajut keindonesiaan yang beragam budaya dan agama serta integrasi bangsa yang dicita-citakan harus tetap dipelihara. Konflik bernuansa kekerasan sosial tidak hanya terjadi di daerah-daerah yang sejak

⁴ H.A. Rusdiana, (2015). Manajemen Konflik. Bandung : Pustaka Setia. hlm 67

⁵ Ichsan Malik. (2017) *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. Jakarta, Kompas Media Nusantara. Hlm 103

sebelumnya kehidupan masyarakat memang kurang harmonis, tetapi juga terjadi di daerah-daerah yang sejak sebelum reformasi diketahui sebagai daerah yang kondusif dan penuh damai. Realita konflik-konflik yang bernuansa hak ulayat adat, etnis dan agama ternyata pernah terjadi di masyarakat, konflik ini disinyalir akibat pemahaman agama yang sempit yang dapat menimbulkan kekerasan sebagai pelaksanaan radikalisme berbasis agama oleh sekelompok orang atau individu⁶.

Pemerintah Kabupaten Ende dalam mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, perlu keterlibatan dan tanggungjawab seluruh komponen di daerah dan Model Segitiga kekuatan Bekerja Membangun Kabupaten Ende Merupakan sinergi “TIGA BATU TUNGKU atau LIKA MBOKO TELU” yang terdiri dari Lembaga Agama, Lembaga Adat dan Pemerintah untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Ende. Namun disini lain belum terlihat secara jelas dalam Rakor Model Segitiga Kekuatan Bekerja Membangun Kabupaten Ende antara Pemerintah dengan Tokoh Agama dan Tokoh Adat, sebagai upaya menjadikan modal perdamaian terkait kekuatan nilai-nilai tersebut dalam mewujudkan budaya damai dan rekonsiliasi, rakor ini masih lebih fokus membahas kelancaran roda pembangunan saja. Sementara fakta dilapangan masih ada saja beberapa konflik sosial yang terjadi di kabupaten Ende.⁷

Paradigma Kebijakan Pertahanan Negara melalui agenda prioritas pertahanan

negara diantaranya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia, melakukan revolusi karakter bangsa dan memperkuat kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.⁸ Sementara dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Pelaksanaan Model Segitiga Kekuatan Bekerja Membangun Kabupaten Ende Pasal 1 ayat (3), (4), (5), (6) dan (7) disebutkan :

- 3) Model segitiga kekuatan bekerja adalah kekuatan sinergitas LIKA MBOKO TELU atau TIGA BATU TUNGKU dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan mendayagunakan seluruh potensi yang ada di Kabupaten Ende yaitu Pemerintah dengan rakyatnya, Agama dengan umatnya dan Tokoh Adat atau Mosa Laki dengan masyarakat adatnya atau Fai Walu Anakalo.
- 4) Tokoh Adat/Mosalaki adalah fungsionaris adat yang diangkat oleh masyarakat adat setempat dengan memperhatikan struktur keturunan adat dan ditetapkan melalui ritual adat yang khas.
- 5) Tokoh agama adalah seorang yang diangkat dan dipercaya oleh hirarki keagamaan dan/atau dipilih oleh umat setempat sebagai pelayan keagamaan di wilayah tertentu.
- 6) Hubungan koordinatif adalah hubungan setara dan saling bekerjasama dalam upaya mencapai tujuan yang sama.
- 7) Hubungan konsultatif adalah hubungan dalam pemberian saran dan rekomendasi yang dilakukan atas suatu masalah yang didiskusikan.⁹

⁶ Tafsir, Agama Antara Juru Damai Dan Pemicu Konflik (Memahami Akar Konflik Dalam Islam), (Semarang: 2007), h. 55-56.

⁷ RPJMD Kabupaten Ende 2014-2019, hlm 1-2

⁸ Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015 hlm 23

⁹ Peraturan Bupati Ende Nomor 7 Tahun 2017, pasal 1

Kabupaten Ende merupakan salah satu dari 22 kabupaten/kota di propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki luas wilayah sebesar 2.046,60 km², Secara administrasi terdiri dari 21 Kecamatan, 255 Desa, 23 Kelurahan dan 893 Dusun/lingkungan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah kecamatan Nangapanda (10,42), diikuti Detukeli, Kotabaru dan Kecamatan Ende, sedangkan wilayah terkecil adalah kecamatan Ndori, dengan proporsi sebesar 0,29 persen dari luas wilayah Kabupaten Ende. Berdasarkan jenis pemerintahan, terdapat 2 (dua) kecamatan yang seluruh wilayah merupakan kelurahan yaitu Kecamatan Ende Selatan dan Ende Tengah, 10 (sepuluh) kecamatan yang tidak mempunyai pemerintahan kelurahan dan 9 (sembilan) kecamatan memiliki unsur pemerintahan desa dan kelurahan¹⁰

Posisi Astronomis, Kabupaten Ende terletak di sebelah selatan khatulistiwa pada koordinat 121°21'6,44" sampai dengan kordinat 122° 1' 28,1604" Bujur Timur dan 08° 55' 28,35" sampai dengan 08° 26' 4,10" Lintang Selatan. Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Ende mempunyai posisi strategis karena beberapa alasan antara lain: 1) Terletak di tengah-tengah Pulau Flores, yang merupakan salah satu dari 3 pulau besar di provinsi NTT, diapiti 5 (lima) Kabupaten di bagian barat, yaitu: Kabupaten Nagekeo, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai Barat, dan 2 (dua) Kabupaten di bagian Timur, yaitu: Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur. Pada awal mula kemerdekaan Negara Republik Indonesia dimana pada waktu itu Bali, NTB dan NTT masih dalam bentuk

¹⁰ BPS Kabupaten Ende, *Ende Dalam Angka 2019*, Ende :PT. Arnorldus Nusa Indah, hlm 7-14

wilayah Nusa Tenggara, Kabupaten Ende merupakan Pusat Pemerintahan Flores. 2) Merupakan jalur utama pelayaran, karena mempunyai akses langsung pelayaran laut menuju kupang sebagai ibu kota provinsi di alur pelayaran Laut Sawu. 3) Kabupaten Ende berada pada lintasan tujuan wisata utama Bali-Lombok Flores, dengan keberadaan danau tiga warna Kelimutu. 4) Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan RI, mendapat tempat tersendiri karena merupakan tempat pengasingan Presiden Soekarno, dan diyakini merupakan tempat permenungan gagasan cemerlang Falsafah Negara Pancasila. Kondisi/Kawasan, wilayah pedalaman di Kabupaten Ende meliputi 213 desa/kelurahan, yang tersebar pada 18 kecamatan, yaitu kecamatan Nangapanda, Maukaro, Wewaria, Detusoko, Wolojita, Wolowaru, Kelimutu, Maurole, Detukeli, Kotabaru, Lio Timur, Ndori, Ende, Ndonga, Ndonga Timur, Lepembusu Kelisoke, Ende Utara, dan Ende Timur. Wilayah terpencil di Kabupaten Ende meliputi 40 desa, yang tersebar pada 13 kecamatan, yaitu kecamatan Nangapanda, Maukaro, Wewaria, Wolowaru, Maurole, Detukeli, Kotabaru, Lio Timur, Ndori, Ende, Ndonga, Ndonga Timur, dan Lepembusu Kelisoke¹¹ Jumlah penduduk Kabupaten Ende sampai akhir tahun 2018 mencapai 272.988 jiwa terdiri atas 129.101 jiwa penduduk laki-laki dan 137.131 jiwa penduduk perempuan. Sebagai kawasan yang secara administratif menjadi kabupaten yang otonom dalam wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur, kabupaten Ende didiami oleh oleh tiga etnik besar sebagai suku asli dan sejumlah etnik yang mendiami daerah perkotaan khususnya kota Ende dan beberapa kecamatan. Kondisi inilah yang

¹¹ Ibid, hlm 7-14

menghadirkan kemajemukan masyarakat khasanah budaya. Tiga etnik besar tersebut yakni Nga'o dengan dialek Nga'o, Ja'o dengan dialek Ja'o dan Lio dengan dialek Aku. Jumlah terbesar adalah penduduk etnik Lio. Sebaran penduduk di Kabupaten Ende memang tidak merata. Di bagian utara yang alamnya lebih subur jarang penduduknya sedangkan dibagian selatan yang relatif tanahnya lebih tandus, justru lebih padat penduduknya¹².

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Ende adalah pemeluk agama Katolik, sebagian pemeluk agama Islam, khususnya Kecamatan Ende Selatan, Kecamatan Ndori, Kecamatan Wolowaru, Kecamatan Pulau Ende, dan Nangapanda. Penganut agama Kristen Protestan dan Hindu terdapat di Kota Ende. Nilai hubungan kekerabatan masih kuat sebagai landasan kebersamaan sehingga perbedaan sistem kepercayaan dan agama tidaklah menjadi kekuatan yang memisahkan¹³.

Masyarakat kabupaten Ende masih memegang kuat kebudayaan-kebudayaan daerah seperti upacara memining, perkawinan, kematian, membuka ladang, panen hasil tanaman pertanian. Kebudayaan daerah tersebut sedikit terpengaruh dengan budaya luar. Karena terjadi infiltrasi kebudayaan yang mempengaruhi berbagai kemajuan seperti semakin mudah dan cepatnya semua lapisan masyarakat mengakses informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik. Perkembangan transportasi yang memudahkan perpindahan penduduk dari dan ke kabupaten Ende. Hal ini dapat terlihat semakin banyaknya penduduk berasal dari luar kabupaten

missalnya; Ngada, Sikka, Manggarai, Flores Timur, Lembata, Sumba, Timor, Jawa, Padang, Makasar, Ambon, Toraja yang juga turut mempengaruhi dinamika kehidupan sosial di Kabupaten Ende¹⁴.

Kondisi sosial pendidikan secara alamiah Flores termasuk daerah yang gersang dan tandus. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena fakta membuktikan curah hujan rendah dan musim panas yang panjang. Problem alamiah ini diperparah dengan keadaan geografis Flores yang tergolong rentan akan bencana alam. Berangkat dari keadaan ini sebetulnya keadaan sosial ekonomi masyarakat Flores khususnya Ende bisa ditakar. Hampir sebagian besar masyarakatnya bertani secara musiman dan tergantung pada hasil pertanian jangka panjang. Sementara yang menetap di pesisir pantai menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapan laut. Dari sini dapat diukur kemampuan ekonomi rata-ratanya, bahwa pendapatan perkapita sangat rendah dan masih banyak yang miskin. Mempersoalkan kemiskinan Flores dari latar belakang geografis dan juga topografis masih terbilang wajar dan itu tidak terelakkan. Lantas untuk mengelak dari keadaan yang demikian sebaian besar kaum muda baik laki-laki maupun perempuan memilih untuk menemukan penghidupan yang layak di tanah perantauan.

Aspek religi asli sebagai sumbu kebudayaan etnik, sebagai bagian atau subsistem kebudayaan, agama ataupun kepercayaan memiliki kedudukan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik secara komunal maupun individual, termasuk pula bagi masyarakat etnik di Kabupaten Ende. Sebagai masyarakat yang memiliki ciri religious, masyarakat Flores umumnya

¹² Ibid, hlm 7-14

¹³ Aron Meko Mbete, (2006) *Khazanah Budaya Lio Ende*, Yogyakarta : Pustaka Larasan hlm 36

¹⁴ Ibid, hlm 37

menganut agama dan kepercayaan sebagai kekuatan kerohanian tersendiri. Kekuatan nilai religius dengan variasi dan dinamikanya itu melandasi dan mewarnai kebudayaan masyarakat kabupaten Ende. Masyarakat etnik Lio-Ende di Kabupaten Ende saat ini umumnya menjadi pemeluk dua agama yang bertradisi besar yakni agama Katolik dan agama Islam. Agama Katolik merupakan penganut dengan jumlah paling banyak diantara penduduk etnik Lio dan Ende dibandingkan dengan penganut agama Islam. Secara historis kedua agama besar itu telah berkembang sejak lama dan mempengaruhi kehidupan sosial-budaya masyarakat¹⁵.

Unsur utama penyebab konflik (Johan Galtung) yaitu ketidaksesuaian/kontradiksi antara perilaku dan kepentingan, perilaku negatif dalam bentuk persepsi atau *stereotype* yang berkembang di antara pihak-pihak yang berkonflik, perilaku kekerasan dan ancaman yang diperlihatkan. Konflik biasanya dimulai dari ketegangan-ketegangan yang bersifat laten lalu berkembang menjadi konflik terbuka berupa pergerakan kekuatan bila melewati ambang toleransi maka konflik yang ada akan menjurus pada sifat-sifat destruktif dan pelanggaran-pelanggaran¹⁶.

Di tengah realitas nasional yang marak dengan konflik bernuansa agama dan etnis ini, bahwa konflik komunal yang banyak memakan korban telah menjadi fenomena di beberapa daerah di Indonesia khususnya konflik-konflik yang muncul di kabupaten Ende, seperti sengketa adat Kasus Rumah Adat di Nduaria terkait tuntutan sangsi adat

pada tahun 2016, konflik lokasi seremoni adat antara desa Wolotopo dan Desa Manulondo kecamatan Ndonga, Seremoni adat antara pihak Suku Kelitembu dan Mosalaki Ela Melo Desa Mukusaki Kecamatan Wewaria, konflik seremoni adat antara suku Embu Leko Tenda dan Embu Nggawa di Tenda Wawo Desa Tenda kecamatan Wolojita. Menanggapi permasalahan ini, harus ada upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga masyarakat sipil, untuk menghentikan konflik. Namun penghentian konflik bukanlah suatu hal yang final, konflik dapat dengan cepat muncul kembali. Konflik menjadi bahaya laten untuk berulang. Untuk itu yang dibutuhkan bukan semata-mata penghentian konflik, melainkan yang lebih penting adalah pencegahan konflik.¹⁷

Ketika berhadapan dengan konflik kekerasan sosial, pemerintah bersama tokoh agama dan tokoh adat (mosalaki) diharapkan dapat menemukan solusi paling tepat dalam penanganan konflik yang terjadi dan membangun perdamaian serta keharmonisan. Nilai budaya dan nilai keagamaan itulah sesungguhnya menjadi kekuatan dalam meresolusi konflik menuju terwujudnya kehidupan yang harmonis dan berbudaya damai. Peneliti akan secara khusus mengeksplorasi budaya dan kehidupan keagamaan di Kabupaten Ende dalam Rakor Tiga Batu Tungku menjadi lokus dan fokus dalam analisis ini. Gambaran dalam latar belakang diatas, mendorong peneliti untuk melakukan kajian tentang Pencegahan Konflik Di Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2019 (Studi Rakor Tiga Batu Tungku).

Metode Penelitian

¹⁷ Ichsan Malik. (2017) *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. Jakarta, Kompas Media Nusantara. Hlm 77

¹⁵ Ibid, hlm 38

¹⁶ J. Galtung (2003). *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*. Surabaya : Pustaka Eureka hlm. 114

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah¹⁸. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah pemilihan kasus yang memiliki tujuan tertentu, dalam penelitian ini peneliti memilih fenomena yang berkaitan dengan peran Rakor Tiga Batu Tungku dalam menangani konflik yang ada di Kabupaten Ende. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data-data yang telah dikumpulkan dilakukan uji keabsahan dengan menggunakan teknik triangulasi. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis menggunakan teknik inductive model dan kemudian dideskripsikan dengan kata-kata untuk mengungkapkan suatu kesimpulan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian narualistik karena dilakukan untuk meneliti suatu obyek yang alamiah. Satori dan komariah menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk dengan kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah.

Selanjutnya Mahdi dan Mujahidin menjelaskan bahwa jenis metodologi kualitatif terdiri dari Etnografi, Studi Kasus, Studi Kepustakaan, Observasi

Alami, Fenomenologi, Grounded Theory, Studi Sejarah dan Biografi. Penelitian studi kasus menggali masalah dengan data yang mendalam dan sumber informasi yang akurat. Kasus yang dipelajari berupa peristiwa, program, aktivitas atau individu dengan tujuan untuk mendeskripsikan dengan lebih utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Data-data pada penelitian studi kasus berasal dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi¹⁹

Subyek Penelitian

Dalam sebuah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, subyek penelitian mempunyai peranan penting, karena data tentang masalah yang akan diteliti berada pada subyek penelitian. Satori dan Komariah, 2009 berpendapat bahwa subyek penelitian pada situasi sosial tertentu dalam sebuah penelitian kualitatif adalah benda, hal atau orang yang padanya melekat data obyek penelitian²⁰ Peneliti memposisikan subjek utama yakni: (1) Pemda: Bupati Ende, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kaban Kesbangpolinmas (2) Tokoh adat: Kepala suku (Mosalaki) dan masyarakat adat, budayawan (3) Agama : Ketua FKUB, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, Rohaniwan Katolik, Pendeta GMIT, Ketua MUI, Pendeta Parisada Hindu.

Dari keseluruhan subjek penelitian berfokus pada eksistensi manusia yang dengan segala kebutuhan, identitas dan karakteristik masing-masing. Keunikan manusia yang berasal dari individualitas manusia sebagai perpaduan/kesatuan unsur fisik dan psikis yang tidak sama

¹⁸ Lexy J. Meleong. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya. Hlm 99

¹⁹Adnan, Mahdi dan Mujahidin, (2014), *Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Desertasi*. Bandung : Alfabeta. hlm 82

²⁰Djam'an satori dan Aan Komariah. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. hlm 66

satu sama yang lain. Manusia dengan kata lain, merupakan sumber data yang heterogen, karena perbedaan antar individu-individu. Berkenaan dengan tujuan penelitian kualitatif, dalam penentuan sampling yang paling penting adalah menentukan informan kunci atau situasi sosial yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam memilih informan kunci lebih tepat dilakukan dengan cara purposive sampling.²¹ Dalam pemilihan sampel dikenal dengan purposive sampling atau snowball sampling. Purposive sampling dilakukan dengan pertimbangan peneliti dalam melakukan menentukan subyek dan obyek yang dianggap representatif sebagai unit analisis berdasarkan kebutuhan penelitian. Sedangkan teknik snowball sampling dengan cara berantai, mula-mula memilih satu atau dua subyek sebagai responden, kemudian meminta untuk merekomendasikan responden lainnya yang berkompeten.²²

Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam suatu penelitian kualitatif merupakan suatu obyek yang alamiah. Saebani mengatakan obyek yang alamiah adalah obyek apa adanya (natural setting) dan tidak dimanipulasi oleh peneliti.²³ Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah Pencegahan konflik di kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2019, Studi Rakor Tiga Batu Tungku.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data secara observasi adalah pengamatan terhadap suatu obyek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data dan dikumpulkan guna kepentingan penelitian. Peneliti akan observasi pada berapa Instansi di pemda diantaranya kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Kesbangpolinmas, Bappeda kabupaten Ende terkait dengan berbagai macam program dan kegiatan yang menyangkut Rakor Tiga Batu Tungku yang diintegrasikan kedalam program pembangunan daerah melalui perencanaan program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁴ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman maupun pengalaman narasumber yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara sebelum melakukan wawancara guna memudahkan dalam penelitian serta supaya data yang dikumpulkan tidak terlupakan. Pedoman wawancara tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai konflik yang terjadi di Kabupaten Ende tahun 2014-2019, pencegahan konflik melalui rakor tiga batu tungku.

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan dari Pemerintahan yakni Bupati Ende tanggal 17 Oktober 2019; Asisten

²¹ Burhan Bungin. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 57

²² Djam'an Satori dan Aan Komariah, op cit, hlm 47-48

²³ Beni A. Saebani, (2015) *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta hlm 234

²⁴ Lexy J. Meleong. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya. Hlm 5

Pemerintahan dan Kesra tanggal 29 Oktober 2019; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tanggal 14 Oktober 2019; Badan Kesbangpollinmas tanggal 25 September 2019, Camat Kelimutu tanggal 3 November 2019; panitia pelaksana rakor tiga batu tungku tanggal 25 September 2019; Kodim 1602 Ende; Polres Ende. Informan dari tokoh adat yakni budayawan dan tokoh adat bapak Bapak Yakobus Ari tanggal 8 Oktober 2019, Bapak Amatus Peta tanggal 4 oktober 2019 sedangkan informan dari tokoh agama yakni Romo Siprianus Sadipun, Pr tanggal 16 Oktober 2019; Pater Herman Sina, SVD tanggal 4 Oktober 2019.

Proses wawancara dilakukan oleh peneliti dengan informan secara personal. Seluruh informan menjawab pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait penelitian guna mendukung data penelitian. Dokumen merupakan sumber informasi sejarah yang ditulis atau dicetak²⁵. Studi dokumentasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subyek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subyek yang bersangkutan²⁶. Dalam dokumentasi penelitian dilaksanakan saat penelitian sedang dilakukan yakni pada tanggal 1 Oktober 2019 sampai tanggal 3 November 2019. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yang dilakukan peneliti, menghasilkan dokumen pribadi

dan dokumen resmi. Dokumen pribadi berupa catatan lapangan dan foto-foto selama penelitian terkait dengan fokus penelitian. Dokumentasi pribadi yang bersifat foto merupakan dokumen pendukung dalam penelitian. Dokumen resmi berupa laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi pemerintah dan mosalaki kabupaten Ende, *Jurnal Sosio Informa*, *Jurnal P3M STAIN Purwokerto*, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, *Jurnal filsafat*. Sumber pustaka tertulis lainnya berupa buku-buku yang berkaitan dengan Teori Eskalasi Glasl, Budaya Damai dan kearifan lokal dan buku-buku yang terkait dengan metodologi penelitian kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Konflik Adat di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur 2014-2019.

Menurut Handoko, jenis konflik antara lain konflik dalam diri individu, konflik antar individu, dalam organisasi, konflik antar individu dengan kelompok, konflik antar kelompok dan konflik antar organisasi. Keberagaman peristiwa dari wujud konflik sosial sesungguhnya dapat diklasifikasikan kedalam enam kelompok konflik sosial yaitu Konflik Pribadi, Konflik Kelompok, Konflik Antar Kelas Sosial, Konflik Rasial, Konflik Politik, Konflik Budaya. Konflik di Kabupaten Ende yang terjadi dalam kurun waktu 2014-2019, berupa konflik adat. Ada beberapa konflik yang terjadi diantaranya konflik adat di desa Wiwipemo dan desa Roga, tahun 2015, konflik lokasi seremoni adat di desa Wolotopo dan manulondo tahun 2016, konflik adat di Desa Kelitembu dan mukusaki tahun 2017, konflik adat di desa Tenda tahun 2017. Namun dalam pembahasan peneliti hanya membahas

²⁵ Haris Herdiansah, (2009) *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Salemba Humanika, hlm 143

²⁶ *Ibid*, hlm 143

konflik nduaria karena eskalasinya mencapai tingkat kerusuhan massal.

Konflik di Desa Nduaria Kecamatan Kelimutu

Pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016 sebanyak 58 warga asal Desa Nduaria, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende diamankan polisi ke Kantor Polres Ende, pasca terlibat dalam kerusuhan massal yang melibatkan para mosalaki dan puluhan warga setempat. Kerusuhan massal itu terjadi berawal ketika, mosalaki (tokoh adat) Niko Fedho memasang teu tipu (tanda larang) di rumah seorang warga atas nama Raimundus Rada yang merupakan kubu dari mosalaki Martinus Mite. Tidak terima dengan aksi yang dilakukan oleh mosalaki Niko Fedho cs maka kubu Martinus Mite, lantas melempari kubu Niko Fedho. Kondisi demikian membuat kedua kubu terlibat dalam kerusuhan massal karena memang kedua yang selama ini berseteru masing-masing memiliki massa pendukung. Bupati Ende, Ir. Marselinus Y.W. Petu mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ende saat ini telah membahas upaya penyelesaian atas peristiwa yang terjadi antara masyarakat di Desa Nduaria Kecamatan Kelimutu itu. Tetapi dengan syarat, semua masyarakat di desa tersebut mendukung usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Demikian ditegaskan Bupati Marsel Petu pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2016. "Pemkab Ende siap menyelesaikan. Kami sudah membahas berbagai langkah yang akan diambil dalam menyelesaikan, tetapi tetap memohon dukungan dari masyarakat desa itu. Karena berbagai langkah apapun yang diambil oleh Pemkab Ende dalam usaha menyelesaikan, tetapi tidak didukung, itu sama saja maka dukungan masyarakat itu sangat penting, Dan sebagai langkah

awal, kata Bupati Marsel Petu, Pemkab Ende akan memfasilitasi upaya perdamaian konflik internal masyarakat adat disana sehingga masyarakat adat tidak menaruh dendam antara satu sama lain. Namun Pemkab Ende berharap adanya kerjasama masyarakat adat dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah adatnya tersebut sehingga rasa aman dan nyaman dalam beraktivitas. Dalam kaitan dengan pengamanan di lapangan dalam hal ini di Nduaria, Pemkab Ende menyerahkan sepenuhnya kepada pihak aparat penegak hukum. Bupati Marsel petu juga menyadari bahwa persoalan di Nduaria ada kaitan dengan masalah hukum maka supaya proses hukum tetap berjalan. Dan dalam proses hukum harus benar-benar mendapat kepastian hukum yang jelas, pinta Bupati Marsel Petu. Dengan demikian lanjut Bupati Marsel Petu, masyarakat Nduaria menjadikan kasus yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2016 itu sebagai bahan pembelajaran agar kasus serupa tidak terjadi lagi atau terulang kembali. Sementara dari Nduaria dilaporkan bahwa situasi sudah berjalan aman dan normal. Masyarakat yang selama ini mengamankan diri sudah kembali ke Nduaria dan melakukan aktivitas seperti biasa. Masyarakat juga sudah menempati kembali rumah-rumah mereka dan rumah-rumah yang dirusaki sudah mulai dibenahi kembali berkat bantuan dari aparat keamanan dan sudah pula ditempati. Bagi mereka-mereka yang melakukan tindakan kekerasan sedang diproses oleh penyidik Polres Ende. Para pihak yang bersengketa tentang kedudukan masing-masing sebagai Kepala Suku (Mosalaki) di Desa Nduaria yang mengakibatkan terjadi konflik dalam Desa Nduaria yang membawa korban dan penderitaan bagi masyarakat adat Desa Nduaria. Kasus

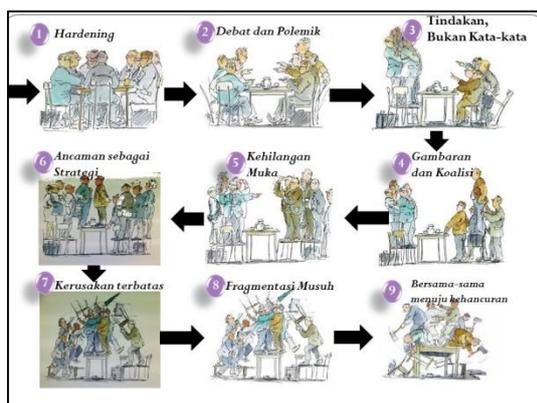
Rumah Adat di Desa Nduaria antara Martinus Mite dengan Nikalaus Fedho terkait tuntutan sangsi adat (Poi) pembangunan rumah adat yang memberatkan pihak Martinus Mite.²⁷

Pada model eskalasi glasl ini dijelaskan bahwa terdapat Sembilan tahapan eskalasi konflik, yaitu :

1. **Hardening**, tahapan ini terdapat posisi yang menguatkan untuk memicu timbulnya konfrontasi. Dimulainya pembentukan kubu-kubu baru didalam kelompok tersebut, kemudian terdapat kecurigaan yang muncul terhadap pihak lain yang memiliki motif tersembunyi. Konflik terjadi pada tanggal 27 Januari 2016. Para pihak yang bersengketa tentang kedudukan masing-masing sebagai Kepala Suku di Desa Nduaria yang mengakibatkan terjadi konflik dalam Desa Nduaria yang membawa korban dan penderitaan bagi masyarakat adat Desa Nduaria.
2. **Debate**, pada tahapan ini muncul polemik karena polarisasi dalam proses berpikir. Fiksasi terhadap sudut pandang pihak internal akibat kecurigaan perilaku pihak lain. Mosalaki (tokoh adat) Niko Fedho memasang teu tipu (tanda larang) di rumah seorang warga atas nama, Raimundus Rada yang merupakan kubu dari mosalaki, Martinus Mite
3. **Action not words**, tahapan ini mulai muncul aksi fisik yang dibarengi dengan data-data yang menjatuhkan lawan. Rasa empati mulai menghilang dengan indikasi pemahaman yang salah pada masing-masing pihak dan mulai muncul *in-group conformity pressure*. Mosalaki (tokoh adat) Niko Fedho memasang teu tipu (tanda larang) di rumah seorang warga atas nama, Raimundus Rada yang merupakan kubu dari mosalaki, Martinus Mite. Tidak terima dengan aksi yang dilakukan oleh mosalaki Niko Fedho cs maka kubu Martinus Mite, lantas melempari kubu Niko Fedho.
4. **Images, Coalitions** merupakan tahap dimana masing-masing kelompok memposisikan lawan sebagai pihak negatif serta mulai melibatkan aktor diluar pihak-pihak yang terlibat secara langsung. Masing-masing dari kelompok Mosalaki Niko Fedho menghimpun para pendukungnya demikian juga kelompok mosalaki Martinus Mithe juga mengumpulkan pendukungnya untuk dilibatkan dalam konflik.
5. **Loss of face** adalah tahapan dimana mulai muncul serangan terbuka yang dilakukan secara langsung, tahapan ini merupakan tahapan eskalasi utama. Kondisi demikian membuat kedua kubu terlibat dalam kerusuhan massal karena memang kedua yang selama ini berseteru masing-masing memiliki massa pendukung. kubu Martinus Mite, lantas melempari kubu Niko Fedho.
6. **Strategies of threat**, munculnya sebuah ancaman dan serangan mulai terjadi, sebagai serangan balik atas serangan sebelumnya yang berdampak pada munculnya ancaman-ancaman dari pihak-pihak yang ada. Kubu Martinus Mithe mengancam akan menyerang kubu Niko Fedho karena tidak terima atas pemasangan tanda larang di rumah warga kubu martinus Mithe.

²⁷ Romualdus Pius, *Warga Nduaria di Kabupaten Ende Bentrok*, <https://kupang.tribunnews.com/2016/01/28/warga-nduaria-bentrok> (diakses 17 September 2019)

7. **Limited destructive blows**, ditahap ini munculnya serangan-serangan yang tidak berperikemanusiaan yang berujung *violence*. Kedua kubu saling serang, dengan melepari batu dan merusak rumah-rumah warga. Karena kedua kubu masing-masing memiliki massa pendukung.
8. **Fragmentasi**, munculnya serangan-serangan yang mulai tereskalasi serta bertujuan untuk menghancurkan leburkan lawan. Terjadi kelumpuhan dan diintegrasikan dimana akibat serangan kedua belah pihak yang bertikai banyak rumah-rumah yang rusak, warga berhamburan menyelamatkan diri. Kerugian harta benda dan tekanan batin warga yang ketakutan.
9. **Together into the abyss**, tahapan terakhir dimana konfrontasi total dengan tujuan kehancuran. Saat itu masing-masing pihak tidak bisa kontrol diri sehingga kerusakan harta benda tidak bisa dihindari.



Gambar 1 Eskalasi Konflik Glasi

Sumber : Materi Kuliah Nature Conflict, 2018

Konflik merupakan perbedaan pendapat atau pandangan adalah bagian dari interaksi manusia sebagai makhluk sosial. Setiap peristiwa atau masalah yang terjadi selalu berhubungan dengan dinamika psikologi individu yang saling berinteraksi dikarenakan dinamika

psikologis setiap individu memiliki beberapa aspek yaitu sikap, persepsi dan perilaku. Melalui aspek-aspek tersebut, maka setiap individu akan menilai dan menyelesaikan permasalahannya. Konflik merupakan suatu proses sosial yang terjadi melalui interaksi diantara dua orang atau lebih, dimana pihak-pihak tersebut memiliki perbedaan pendapat dan ingin saling menyingkirkan. Konflik berkaitan erat dengan hubungan sosial masyarakat, baik secara personal ataupun kolektif, dan memiliki tingkat antagonisme tertentu, ketegangan, serta perasaan negatif. Hal ini muncul dari keinginan individu atau kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan, kekuasaan, prestise, dukungan sosial, dan penghargaan²⁸.

Dalam hal konflik yang terjadi di Kabupaten Ende pertentangan yang terjadi bisa dilihat sebagai akibat terjadinya pertentangan di masyarakat terkait pelaksanaan hal yang berkaitan dengan persoalan adat.

Polemik dimana dalam keadaan itu mereka saling tidak menerima argument yang masuk akal, berusaha agar terlihat berhasil, kuat dan terampil dimata lawan. Tokoh adat Niko Fedho memasang tanda larang di rumah seorang warga atas nama Raimundus Rada yang merupakan kubu martinus mite. Ketika salah satu pihak merasa bahwa berbicara mulai tidak berguna dan mulai bertindak tanpa berkonsultasi dengan pihak lain. Maka perilaku dan komunikasi non verbal akan mendominasi dan mempercepat eskalasi konflik. Selanjutnya kedua belah pihak merasa bahwa perilaku mereka adalah reaksi terhadap tindakan dan niat pihak lain, serta tidak merasa bertanggungjawab atas eskalasi lebih lanjut dari konflik. Komunikasi sudah

²⁸ H.A. Rusdiana, (2015). *Manajemen Konflik*. Bandung : Pustaka Setia. Hlm 67-72

sangat tidak sehat, cenderung saling menjatuhkan dan menuju ke arah kebuntuan, tidak agresif tak terkendali dan meningkatnya kekacauan dan kompleksitas menyebabkan disintegrasi yang akhirnya mulai bertindak secara sendiri-sendiri. Dorongan untuk memusnahkan musuh lebih kuat daripada naluri untuk mempertahankan diri, tidak memperhitungkan kelangsungan hidup sendiri. Serangan yang langsung ditujukan pada kelompok lawan adalah menghancurkan kekuatan pihak lain kelompok yang lemah tercerai berai yang membuat suasana semakin kacau. Tidak ada komunikasi nyata, mereka yang bertikai hanya peduli dengan perasaan mereka sendiri, dan mereka tidak peduli pesan yang diterima atau di respon.

Pemahaman sederhana yang tersebar luas mengenai damai adalah tidak adanya kematian dan kerusakan akibat perang, dan kekerasan fisik atau kekerasan langsung merupakan pemahaman yang digunakan sebagai titik awal pelaksanaan penelitian mengenai kedamaian dengan baik sehingga penduduk relatif puas, banyak keinginan yang damai dalam dimensi politik yaitu ketika demokrasi global dapat berjalan terpenuhi dalam batas yang memungkinkan, hak asasi manusia menunjuk ke arah yang sama yaitu keadilan.

Pemkab Ende akan memfasilitasi upaya perdamaian konflik internal masyarakat adat disana sehingga masyarakat adat tidak menaruh dendam antara satu sama lain.

Pencegahan Konflik di Kabupaten Ende.

Dalam merancang langkah-langkah mencegah konflik, tetapi juga langkah-langkah untuk menghapus kondisi yang menyebabkan pecahnya konflik di tingkat pertama. Hal ini dapat dilakukan

dengan membedakan antara kebijakan proaktif yang mengurangi kondisi struktural yang mengarah pada kekerasan, dan kebijakan pencegahan yang membahas sumber langsung dari konflik oleh kelompok fungsional, kelompok pemangku kepentingan ini diharapkan dapat berkomunikasi, memberi kontribusi, bekerjasama, dan saling berkoordinasi dengan mereka untuk mencegah terjadinya konflik dan menghentikan konflik jika sudah terjadi. Budaya damai (culture of peace) dipahami bukan sebagai suatu kondisi yang ada begitu saja sebagai suatu pemberian dan harus diterima oleh umat manusia. Kegagalan berkomunikasi pada pihak-pihak yang bertikai adalah tidak dapat menyampaikan pikiran, perasaan dan tindakan, sehingga membuka jurang perbedaan informasi diantara mereka, keadaan ini mendorong mereka menjadi cemas²⁹.

Dalam Rakor Tiga Batu Tungku yang sudah dilaksanakan setiap tahun dari tahun 2014 sampai dengan 2019 dengan harapan bahwa mendapat hasil capaian yaitu :

- a) Investasi bagi tersediannya data peta wilayah ulayat, data Mosalaki, data jenis-jenis seremoni yang dilakukan, data doa-doa yang digunakan Mosalaki dalam pelaksanaan seremoni adat dan data jenis-jenis bangunan simbol adat sebagai bahan musyarwarah pembangunan daerah yang dimulai dari desa dan kelurahan.
- b) Investasi bagi tersediannya data desa/kelurahan dan kecamatan yang telah membentuk Tiga Batu Tungku.

²⁹Rasid Yunus (2014), *Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa: Studi Empiris Tentang Huyula*, (Yogyakarta: Deepublish), 2014, hlm. 91

- c) Investasi bagi tersedianya data promosi pariwisata bagi desa-desa dan wilayah ulayat menjadi destinasi pariwisata.
- d) Investasi para Mosalaki menjadi narasumber dalam tulisan-tulisan ilmiah dan penerbitan buku serta penelitian oleh pihak lain.
- e) Investasi menghidupkan dan mengajarkan kembali berbagai bentuk seremoni adat dari generasi muda melalui budaya cipta.
- f) Investasi para budayawan membagikan pengetahuannya kepada generasi muda melalui wadah-wadah pertemuan di Desa dan Kelurahan.
- g) Investasi menghidupkan kembali upacara pengukuhan, perutusan, pengurapan kepada Mosalaki yang akhir-akhir ini mulai hilang. Guna mengembalikan wibawa dan posisi Mosalaki sesuai dengan garis keturunannya.
- h) Investasi berkurangnya pelanggaran-pelanggaran nilai-nilai adat, terpeliharanya tempat-tempat seremoni adat.

Demokrasi masyarakat adat memiliki keunikan karena bersumber dari kearifan dan nilai-nilai asli budaya lokal. Namun karena perkembangan global demokrasi lokal telah mengalami degradasi nilai, dan hal ini membuat posisi masyarakat adat mulai lemah dan menjadi tantangan dalam pembangunan ditingkat desa dan supra desa.

Munculnya konflik dalam komunitas masyarakat adat terutama yang berkaitan dengan hak tanah ulayat disebabkan oleh mulai lunturnya kepatuhan dalam komunitas adat terhadap bentuk-bentuk nilai hukum adat dalam komunitas masyarakat lokal yang diwariskan oleh leluhur mereka dan semestinya dipatuhi dengan segenap

hati. Kondisi ini perlu segera dibenahi bersama antara pemerintah dan masyarakat adat di Kabupaten Ende dalam tahun 2014-2019 agar ada kesamaan persepsi antara pemerintah daerah dan para Mosalaki sebagai Ketua adat/Kepala hak ulayat sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah dapat berjalan beriringan untuk kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat adat yang kita sebut "Fai walu ana kalo" (masyarakat adat).

Forum model segitiga pembangunan Kabupaten Ende yang ingin mensejajarkan peran dan fungsi pemerintah, tokoh adat (Mosalaki) dan tokoh agama tahun 2014-2019 yang diawali dalam forum Rapat koordinasi ini, merupakan momentum kebangkitan kembali sekaligus pengakuan pemerintah terhadap keberadaan masyarakat adat bersama para pemimpin adat (Mosalaki) bahwa ada peran dan fungsi yang sama sebagai kekuatan utama dalam pencegahan konflik di Kabupaten Ende yang berkarakter sesuai tradisi budaya Ende-Lio-Nga'o.

Gebrakan Bupati Ende melalui forum rapat koordinasi masyarakat adat telah sesuai dengan konstitusi negara kita dalam UUD 1945 yang secara nyata mengakui keberadaan komunitas masyarakat adat bersama hak-hak ulayat masyarakat. Soal komitmen dan kemauan politik pemerintah Kabupaten Ende untuk mengakomodir keberadaannya adat dan pemimpin adat (Mosalaki) sebagai mitra dalam bekerja membangun Kabupaten Ende sebagai alternatif terbaik menuju keberhasilan bersama. Mitra diantara ketiga model batu tungku yaitu pemerintah, adat dan agama perlu menjadi modal sosial karena harus kita akui bahwa masyarakat adat dibawah kepemimpinan Mosalaki selaku

kepala adat, memiliki wilayah teritorial yang disebut hak atas tanah ulayat lengkap dengan semua potensi yang terkandung didalamnya dan memiliki kearifan lokal yang dapat mendukung pencegahan konflik di Kabupaten Ende. Mosalaki memiliki otoritas dalam menjalankan tugas fungsinya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat³⁰.

Pencegahan konflik merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam rangka penyelesaian konflik. Pencegahan konflik atau biasa dikenal dengan conflict prevention bertujuan untuk mencegah konflik agar tidak mencapai pada tingkat open conflict. Artinya, pencegahan konflik merupakan langkah awal agar konflik tidak muncul sebagai tindakan yang destruktif. Untuk itu, konflik harus bisa dikelola agar tidak sampai pada tindak kekerasan.

Dalam konsep Kearifan lokal yaitu berupa tata aturan tak tertulis yang menjadi acuan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan, termasuk didalamnya hubungan antar sesama manusia. Dengan demikian kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus.

Hak ulayat adalah bicara tentang mereka yang mempunyai tanah adat dan yang diwariskan oleh nenek moyang melalui seremoni adat. Karena agar

duduk bersama menyelesaikan persoalan ini. "Soal Ria Bewa bukan soal menang kalah, tapi mengalah untuk masyarakat ana kalo fai walu demi kebaikan bersama. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Budaya dama dipahami bukan sebagai suatu kondisi yang ada begitu saja sebagai suatu pemberian dan harus diterima oleh umat manusia. Pemahaman sederhana yang tersebar luas mengenai damai adalah tidak adanya kematian dan kerusakan akibat perang, dan kekerasan fisik atau kekerasan langsung merupakan pemahaman yang digunakan sebagai titik awal pelaksanaan penelitian mengenai kedamaian dengan baik, banyak keinginan yang damai dalam dimensi politik yaitu ketika demokrasi global dapat berjalan terpenuhi dalam batas yang memungkinkan, hak asasi manusia menunjuk ke arah yang sama yaitu keadilan.

Pemkab Ende akan memfasilitasi upaya perdamaian konflik internal masyarakat adat disana sehingga masyarakat adat tidak menaruh dendam antara satu sama lain.

Dalam masyarakat adat di Ende kebanyakan masih ada hubungan darah dan kekerabatan sehingga tidak perlu diperpanjang persoalan-persoalan yang ada, namun dilakukan pendekatan secara kekeluargaan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Kesimpulan

Konflik yang terjadi Ende tersebut termanifestasi dalam beberapa pertentangan yang timbul di permukaan seperti permasalahan batas wilayah Ulayat Adat, Pengakuan sebagai

³⁰ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ende, Laporan Pelaksanaan Rakor Tiga Batu Tungku, (Ende : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Mosalaki, perbedaan nilai antara mosalaki yang satu dengan yang lain, kepentingan politik dan sosial. Konflik ini diperkuat oleh terjadinya pergeseran nilai dalam masyarakat sebagai akibat globalisasi dan perbedaan pemahaman mengenai tata budaya itu sendiri. Bila dirunut lebih jauh maka dapat disimpulkan bahwa persoalan yang menjadi akar permasalahan di kabupaten Ende ialah mengenai eksistensi Adat itu sendiri. Saat ini terjadi pergeseran nilai bagi sebagian masyarakat Ende mengenai makna dan hakikat fungsi dan peran masing-masing orang adat itu sendiri. Pada masa lalu simbol-simbol adat, upacara seremoni adat sering dan rutin dilaksanakan, hal ini dilakukan dalam mempertahankan dan menjaga efisiensi kepemilikan tanah dan memperbanyak jumlah warga, namun, sesuai perkembangan zaman, kini dimaknai sebagai rutinitas biasa yang juga berurusan dengan hal yang berkaitan dengan finansial serta memudarnya budaya nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus dalam masyarakat adat. Ada dua dimensi konflik yakni konflik antar anggota masyarakat tebo fai walu lo ana kalo dan konflik antar pemangku adat tebo laki lo onggga. Konflik yang terjadi pada dimensi tebo fai walu lo ana kalo akan lebih mudah diwadahi dan difasilitasi oleh pemimpin lembaga adat tebo laki lo onggga. Namun yang palig sulit dan rumit jika terjadi dalam dimensi tebo laki lo onggga(susi dui padi kedo) apa lagi kalau konflik yang terjadi melibatkan tebo laki lo onggga yang memiliki fungsi sebagai lembaga peradilan mosa laki ria bewa (tau keso pesi relo mbelo/tau sasa masa lewo lina) atau penentu kebijakan dalam upaya penyelesaian dalam hal ini mosalaki pu'u (utama). Dalam mengembangkan budaya damai

khususnya dari kearifan lokal masyarakat untuk dapat direplikasikan di daerah ini, perlu di adakan pengembangan penelitian yang lebih mendalam. Karakter masyarakat dalam setiap daerah yang berbeda menjadi fokus yang harus dikaji agar aktualisasi nilai kearifan lokal yang ada dapat berjalan dengan baik sehingga menghasilkan budaya damai secara menyeluruh. Replikasi nilai inilah yang membutuhkan pengembangan dan dukungan dari berbagai pihak tidak hanya untuk mengenalkan pada masyarakat tapi juga bisa dijadikan pedoman hidup masyarakat dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Pencegahan konflik di Kabupaten Ende yakni dengan bermusyawarah, antara pihak-pihak yang berkonflik dengan dimediasi oleh pemerintah daerah. Rapat Koordinasi Tokoh Adat, Tokoh Agama bersama pemerintah (Rakor Tiga Batu Tungku) merupakan sarana bertemunya para pemimpin-pemimpin suku adat yang ada di wilayah Kabupaten Ende dengan demikian dapat dijadikan sebagai ruang untuk merajut dan menumbuhkan kekuatan bekerjasama dan sama-sama bekerja dalam konteks kemitraan sesuai peran dan fungsi masing-masing pemerintah, para mosalaki dan pimpinan agama. Pemerintah Kabupaten Ende telah mengaktualisasikan nilai-nilai adat istiadat dalam kegiatan Rakor Tiga Batu Tungku, hanya saja belum secara keseluruhan memaknai dan menindaklanjuti hasil-hasil capaian dalam rakor tersebut sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya budaya damai. Oleh karenanya dibutuhkan peran yang besar dari para tokoh baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat untuk mengenalkan nilai-nilai dan tradisi-tradisi yang di turunkan oleh para leluhur ini sedini mungkin pada generasi penerus

agar budaya damai dan kearifan lokal sebagai sarana pencegahan konflik dapat berkembang di masyarakat Kabupaten Ende. Kelestarian suatu budaya tidak hanya dari bagaimana masyarakat menjaganya, tetapi pemerintah sebagai pemangku kepentingan juga harus ikut andil. Adanya kearifan lokal budaya MI MINA dalam Pencegahan dan penanganan konflik sosial perlu dilestarikan, dan Perlunya aksi lanjutan dalam penguatan lembaga adat yang ada, sehingga dapat berfungsi efektif dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial yang terjadi. Rakor tiga batu tungku sebagai upaya pencegahan konflik adat di kabupaten Ende dapat di jadikan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah yang adat di Kabupaten Ende.

Daftar Pustaka

Buku

- BPS Kabupaten Ende, *Ende Dalam Angka 2019*, Ende :PT. Arnorldus Nusa Indah
- Bungin Burhan. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Drs. Tafsir, M.Ag, *Agama Antara Juru Damai Dan Pemicu Konflik (Memahami Akar Konflik Dalam Islam)*, (Semarang: 2007)
- Galtung, J (2003). *Studi Perdamaian : Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*. Surabaya : Pustaka Eureka
- Jamil Mukhsin. (2012). *Tradisi Ikhtilaf dan Budaya Damai di Pesantren*. Semarang: Litbang.
- Malik Ichsan. (2017) *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. Jakarta, Kompas Media Nusantara.

Mbete Aron Meko, (2006) *Khazanah Budaya Lio Ende*, Yogyakarta : Pustaka Larasan

Meleong Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Mujahidin, Adnan Mahdi (2014) *Panduan Penelitian Praktis untuk menyusun Skripsi, Tesis dan Desertasi*. Bandung: Alfabeta.

Rusdiana H.A, (2015). *Manajemen Konflik*. Bandung : Pustaka Setia.

Saebani Beni A, (2015). *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian*. Bandung : Alfabeta.

Satori Djam'an dan Komariah Aan. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

Yunus Rasid (2014), *Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa: Studi Empiris Tentang Huyula*, (Yogyakarta: Deepublish), 2014, hlm. 91

Peraturan Perundang-undangan

Buku Putih Pertahanan Indonesia. (2015). Jakarta : Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Pelaksanaan Model Segitiga Kekuatan Bekerja Membangun Kabupaten Ende

RPJMD Kabupaten Ende 2014-2019

website

Pius Romualdus, *Warga Nduaria di Kabupaten Ende Bentrok dalam* <https://kupang.tribunnews.com/2016/01/28/warga-nduaria-bentrok> (diakses 17 September 2019).